

**REORIENTASI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN
KALIMANTAN SELATAN: DARI EKONOMI EKSTRAKTIF
MENUJU EKONOMI BERBASIS POTENSI WILAYAH**

***REORIENTATION OF SOUTH KALIMANTAN'S ECONOMIC
DEVELOPMENT: FROM AN EXTRACTIVE ECONOMY
TO AN ECONOMY BASED ON REGIONAL POTENTIAL***

Andis Destrian Irianto^{1*}, Mega Tri Wulandari², Fauzan Isya Duri³

^{1,2,3}Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan,
Institut Teknologi Bandung, Indonesia

*Alamat Email Penulis Korespondensi: andisdestrian166@gmail.com

Diserahkan: 24/12/2025 Diperbaiki: 03/02/2026 Disetujui: 31/03/2026

DOI: 10.47441/jkp.v21i1.478

Abstrak

Pembangunan ekonomi di Kalimantan Selatan masih didominasi oleh sektor ekstraktif, khususnya pertambangan dan penggalian, meskipun wilayah ini memiliki potensi sumber daya yang beragam. Ketergantungan ini menciptakan kerentanan ekonomi akibat fluktuasi harga komoditas dan berkontribusi pada degradasi lingkungan serta peningkatan risiko bencana hidrometeorologi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan dinamika ekonomi Kalimantan Selatan sebagai dasar untuk mengarahkan kembali pembangunan menuju model yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data PDRB harga konstan untuk periode 2020–2023, dianalisis melalui *Location Quotient*, *Dynamic Location Quotient*, dan *Klassen Typology*. Hasil menunjukkan bahwa pertambangan tetap menjadi sektor dasar utama, namun mengalami perlambatan, sementara sektor pertanian, pengelolaan air dan limbah, pendidikan, dan kesehatan relatif stabil dan menjanjikan. Sektor nonpokok seperti manufaktur, perdagangan, dan jasa keuangan juga menunjukkan potensi sebagai pendorong diversifikasi ekonomi, menyoroti kebutuhan akan kebijakan yang memperkuat sektor non-ekstraktif dan meningkatkan nilai tambah.

Kata Kunci: Ekonomi Wilayah, Reorientasi Pembangunan, Sektor Ekstraktif, Diversifikasi Ekonomi

Abstract

Economic development in South Kalimantan remains dominated by the extractive sector, particularly mining and quarrying, despite the region's diverse resource potential. This dependency creates economic vulnerability to commodity price fluctuations and contributes to environmental degradation and increased hydrometeorological disaster risks. This study aims to examine the structure and dynamics of South Kalimantan's economy as a basis for reorienting development toward a more sustainable and resilient model. The study employs a quantitative approach using constant-price GRDP data for 2020–2023, analyzed through Location Quotient, Dynamic Location Quotient, and Klassen Typology. The results show that mining remains the main base sector but is experiencing a slowdown, while agriculture, water and waste management, education, and health sectors are relatively stable and promising. Non-base sectors such as manufacturing, trade, and financial services also show potential as drivers of economic diversification, highlighting the need for policies that strengthen non-extractive sectors and increase value added.

Keywords: Regional Economy; Development Reorientation, Extractive Economy, Economic Diversification

PENDAHULUAN

Hutan hujan tropis di Pulau Kalimantan merupakan bagian dari hutan tropis Borneo yang dikenal luas sebagai *carbon sink* besar, berperan signifikan dalam penyimpanan karbon jangka panjang dan mitigasi perubahan iklim global melalui penyerapan CO₂ dari atmosfer (Qie *et al.*, 2017). Selain itu, studi juga menemukan hubungan positif antara cadangan karbon di hutan tropis dan tingkat keanekaragaman pohon, menunjukkan bahwa wilayah dengan stok karbon tinggi juga merupakan *biodiversity hotspot* (Labrière *et al.*, 2016). Secara global, hutan tropis merupakan pusat penting untuk penyimpanan karbon sekaligus keanekaragaman hayati, sehingga konservasi kawasan tersebut menjadi kunci dalam strategi mitigasi perubahan iklim dan pelestarian spesies di tingkat global (Sullivan *et al.*, 2017). Sebagai bagian dari ekosistem hutan hujan tropis Borneo, wilayah Kalimantan Selatan dicirikan oleh dominasi tutupan hutan tropis yang kompleks, jaringan sungai yang luas, serta bentang alam dataran rendah yang ketergantungannya pada keseimbangan hidrologis alami sangat tinggi. Studi menunjukkan bahwa hutan tropis memainkan peran penting dalam fungsi hidrologis seperti infiltrasi, aliran dasar sungai, dan regulasi aliran air dari curah hujan, yang berkontribusi terhadap stabilitas sistem hidrologi regional (Kumagai *et al.*, 2025; Nainar *et al.*, 2018). Selain itu, perubahan tutupan hutan di kawasan tropis telah terbukti mempengaruhi pola curah hujan dan dinamika air secara regional, dengan implikasi penting bagi ketersediaan air dan risiko banjir (Iqbal *et al.*, 2025; Smith *et al.*, 2023). Dalam perspektif pembangunan wilayah, kondisi ini seharusnya menjadi modal dasar (*natural capital and territorial capital*) untuk mendorong pengembangan ekonomi yang selaras dengan karakteristik wilayah dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Barca *et al.*, 2012; Boschma, 2015).

Realitas pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan menunjukkan adanya paradoks antara kekayaan ekologis dan arah struktur perekonomian daerah. Meskipun memiliki modal alam yang besar, struktur PDRB daerah masih didominasi oleh sektor-sektor berbasis ekstraksi sumber daya alam, khususnya pertambangan dan penggalian, yang mencerminkan pola *resource-based development* dengan tingkat diversifikasi ekonomi yang rendah (Auty, 2007; Muzdalifah *et al.*, 2025). Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif ini juga menempatkan perekonomian daerah pada kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global serta tekanan lingkungan yang signifikan (McCarthy & Robinson, 2016; Sachs & Warner, 2001). Sejumlah kajian menunjukkan bahwa sektor pertambangan, terutama batubara, secara konsisten menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Selatan, dengan kontribusi yang jauh melampaui sektor-sektor berbasis pengolahan dan jasa bernilai tambah tinggi. Ketergantungan ini mencerminkan pola ekonomi ekstraktif yang menempatkan eksploitasi sumber daya alam primer sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketergantungan yang berlebihan terhadap sektor ekstraktif kerap dikaitkan dengan berbagai persoalan struktural. Wilayah yang mengandalkan sumber daya alam primer cenderung mengalami keterbatasan diversifikasi ekonomi, rendahnya inovasi, serta lemahnya pengembangan sektor produktif lainnya (Auty, 2007; Sachs & Warner, 2001). Fenomena ini dikenal luas sebagai *resource curse*, di mana kekayaan sumber daya alam justru menjadi penghambat transformasi struktural dan pembangunan ekonomi jangka panjang (Frankel, 2010).

Selain persoalan ekonomi, dominasi sektor ekstraktif juga membawa implikasi serius terhadap kondisi lingkungan hidup. Ekspansi pertambangan dan perubahan penggunaan lahan secara masif telah menyebabkan degradasi hutan dan fragmentasi lanskap di berbagai wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Selatan. Studi berbasis citra satelit menunjukkan bahwa deforestasi di Kalimantan sangat berkorelasi dengan aktivitas pertambangan, pembukaan lahan skala besar, dan lemahnya pengendalian tata ruang (Austin *et al.*, 2019; Gaveau *et al.*, 2014). Perubahan tutupan lahan ini tidak hanya

mengurangi luas hutan, tetapi juga mengganggu fungsi ekologis utama, khususnya dalam menjaga keseimbangan sistem hidrologi daerah aliran sungai.

Dampak dari degradasi lingkungan tersebut semakin terasa melalui meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologis, terutama banjir. Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kejadian banjir besar yang terjadi baru-baru ini, mengalami peristiwa banjir yang meluas dan berdampak signifikan terhadap permukiman, infrastruktur, serta aktivitas ekonomi masyarakat (C. Indonesia, 2025; C. N. N. Indonesia, 2025). Banjir di wilayah tropis tidak dapat dipahami semata sebagai fenomena alam, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan pola pembangunan wilayah (Tellman *et al.*, 2021; Ward *et al.*, 2013). Perubahan tata guna lahan di daerah hulu secara signifikan mempengaruhi respon hidrologi daerah aliran sungai: hilangnya vegetasi dan peningkatan lahan tidak menyerap air memperbesar limpasan permukaan dan debit puncak, sehingga meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir (Astuti *et al.*, 2019; Banjara *et al.*, 2024; Oo & Humphries, 2025). Studi di Indonesia juga menemukan bahwa alih fungsi hutan menjadi pertanian, permukiman, atau infrastruktur mengurangi kapasitas retensi air tanah dan mempercepat aliran permukaan menuju sungai, memperparah kejadian banjir (Ridwan & Sarjito, 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa model pembangunan ekonomi yang terlalu berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam telah melampaui batas daya dukung lingkungan (*ecological carrying capacity*). Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa pengelolaan berkelanjutan akan menggerus modal alam, menurunkan jasa ekosistem, dan melemahkan fondasi kesejahteraan jangka panjang (Barbier, 2019; Rockström *et al.*, 2009). Dalam jangka panjang, degradasi lingkungan tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem, tetapi juga stabilitas sosial dan ekonomi daerah, karena meningkatnya kerentanan terhadap bencana dan terganggunya produktivitas ekonomi lokal (Bangalore *et al.*, 2017; Costanza *et al.*, 2014).

Kerugian akibat banjir menjadi salah satu bukti nyata tingginya biaya eksternal (*negative externalities*) dari ekonomi ekstraktif. Banjir menyebabkan kerusakan infrastruktur, gangguan aktivitas ekonomi, serta memperburuk kondisi kelompok masyarakat miskin yang memiliki kapasitas adaptasi terbatas, sehingga memperdalam ketimpangan sosial (Carter *et al.*, 2007; Winsemius *et al.*, 2018). Berbagai studi menunjukkan bahwa biaya sosial-ekonomi dan lingkungan akibat bencana sering kali jauh melampaui manfaat ekonomi jangka pendek yang dihasilkan oleh sektor berbasis ekstraksi sumber daya alam (Barbier, 2019).

Pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa kondisi tersebut mengindikasikan perlunya pergeseran mendasar dalam paradigma pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan berbasis ekstraksi semakin dipandang tidak memadai untuk menjawab tantangan lingkungan dan ketahanan ekonomi wilayah (Sachs & Warner, 2001). Salah satu pendekatan yang relevan adalah pengembangan ekonomi berbasis potensi wilayah (*place-based development*), yang menekankan pemanfaatan karakteristik lokal sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kapasitas kelembagaan sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan resilien (Barca *et al.*, 2012; Pike *et al.*, 2017).

Dalam konteks tersebut, penting untuk memahami bagaimana struktur perekonomian Kalimantan Selatan dapat bertransformasi menuju pola pembangunan yang lebih berkelanjutan dan tidak bergantung secara berlebihan pada sektor ekstraktif (Auty, 2007; Barbier, 2019; Sachs & Warner, 2001). Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan atau pada analisis makro kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah, namun masih relatif terbatas kajian yang secara komprehensif menganalisis keterkaitan antara struktur ekonomi sektoral, potensi pengembangan sektor alternatif, serta implikasinya terhadap keberlanjutan pembangunan wilayah di Kalimantan Selatan. Padahal, pemahaman mengenai dinamika keterkaitan antar sektor ekonomi sangat penting untuk mengidentifikasi sektor-sektor

potensial yang dapat menjadi motor diversifikasi ekonomi daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif (Boschma, 2015; Martin & Sunley, 2015; McCann & Ortega-Argilés, 2011). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan keterkaitan sektoral dalam perekonomian Kalimantan Selatan guna mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi strategis dalam mendorong transformasi ekonomi daerah menuju pola pembangunan yang lebih berkelanjutan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada analisis dampak sektor pertambangan secara parsial, penelitian ini menekankan pada analisis struktur ekonomi regional dan keterkaitan antarsektor sebagai dasar untuk merumuskan arah reorientasi pembangunan ekonomi daerah yang lebih resilien secara ekonomi sekaligus selaras dengan keberlanjutan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini dirancang untuk mendukung analisis reorientasi pengembangan perekonomian Kalimantan Selatan melalui pendekatan ekonomi wilayah berbasis kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran empiris dan terukur mengenai struktur, kinerja, serta dinamika sektoral perekonomian daerah, yang sangat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan pembangunan wilayah (Capello, 2016; McCann, 2013). Dalam kajian ekonomi regional, analisis sektoral berbasis data makro regional seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif wilayah, struktur ekonomi, serta arah transformasi sektoral (Isard *et al.*, 2017).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha Provinsi Kalimantan Selatan serta wilayah referensi, yaitu perekonomian nasional Indonesia, dalam periode tahun 2020–2023. Penggunaan PDRB ADHK bertujuan untuk menangkap perubahan aktivitas ekonomi riil tanpa dipengaruhi oleh inflasi atau perubahan harga, sehingga lebih relevan dalam analisis pertumbuhan ekonomi regional dan dinamika sektoral (Barro & Sala-i-Martin, 2003; Irianto, 2025). Pemilihan periode 2020–2023 didasarkan pada ketersediaan data sektoral terbaru yang konsisten setelah pembaruan klasifikasi lapangan usaha oleh Badan Pusat Statistik serta untuk menggambarkan dinamika ekonomi daerah pada periode pemulihan pasca-pandemi. Meskipun rentang waktu ini relatif lebih pendek dibandingkan analisis transformasi struktural jangka panjang, periode tersebut tetap penting untuk mengidentifikasi perubahan awal pola keunggulan sektoral serta arah pergeseran struktur ekonomi daerah setelah guncangan ekonomi global akibat pandemi COVID-19. Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa analisis dinamika sektoral dalam periode krisis dan pemulihan ekonomi dapat memberikan informasi penting mengenai ketahanan dan adaptasi struktur ekonomi wilayah (Martin & Sunley, 2015).

Teknik analisis pertama yang digunakan adalah Location Quotient (LQ) untuk mengidentifikasi sektor basis dan nonbasis dalam perekonomian daerah.. LQ merupakan rasio yang membandingkan kontribusi suatu sektor terhadap PDRB daerah dengan kontribusi sektor yang sama pada wilayah referensi (Richardson, 1976). Secara matematis, rumus LQ dapat dituliskan sebagai berikut:

$$LQ = \frac{X_{ij}/X_i}{X_j/X}$$

Keterangan:

X_{ij} = Nilai tambah sektor j di daerah i (Kalimantan Selatan)

X_i = Total PDRB daerah i

X_j = Nilai tambah sektor j pada wilayah referensi (Indonesia)

X = Total PDB wilayah referensi

Interpretasi nilai LQ adalah sebagai berikut, apabila $LQ > 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor basis, yaitu sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi mengekspor ke luar wilayah. Sebaliknya, apabila $LQ < 1$ maka sektor tersebut termasuk sektor nonbasis yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal (Kuncoro, 2012; Miller & Blair, 2009). Untuk melengkapi sifat statis dari analisis LQ, penelitian ini menggunakan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) yang bertujuan untuk menangkap perubahan keunggulan sektoral secara temporal. DLQ mengukur perubahan spesialisasi sektor dalam periode tertentu sehingga dapat menunjukkan apakah suatu sektor mengalami peningkatan atau penurunan daya saing relatif dari waktu ke waktu (Nazara, 1997; Sjafrizal, 2014). Secara umum, rumus DLQ dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$DLQ = \left(\frac{(1 + g_{ij}) / (1 + g_i)}{(1 + G_j) / (1 + G)} \right)^t$$

Keterangan:

- g_{ij} = Laju pertumbuhan sektor j di daerah i
- g_i = Laju pertumbuhan total PDRB daerah i
- G_j = Laju pertumbuhan sektor j di wilayah referensi
- G = Laju pertumbuhan total PDB wilayah referensi
- t = Periode waktu analisis

$DLQ > 1$ maka sektor tersebut memiliki kecenderungan menguat dalam struktur ekonomi daerah, sedangkan apabila $DLQ < 1$ maka sektor tersebut menunjukkan kecenderungan menurun secara relatif dibandingkan wilayah referensi. Analisis selanjutnya menggunakan Tipologi Klassen untuk mengklasifikasikan sektor ekonomi berdasarkan kombinasi antara tingkat pertumbuhan sektoral dan kontribusi sektor terhadap PDRB daerah. Pendekatan ini membagi sektor ekonomi ke dalam empat kuadran utama (Sjafrizal, 2014), yaitu:

1. Kuadran I (sektor maju dan tumbuh pesat): sektor dengan tingkat pertumbuhan dan kontribusi lebih tinggi dari rata-rata wilayah referensi.
2. Kuadran II (sektor maju tetapi tertekan): sektor dengan kontribusi tinggi tetapi pertumbuhan lebih rendah dari rata-rata.
3. Kuadran III (sektor berkembang): sektor dengan pertumbuhan tinggi tetapi kontribusi masih relatif rendah.
4. Kuadran IV (sektor relatif tertinggal): sektor dengan pertumbuhan dan kontribusi yang sama-sama rendah.

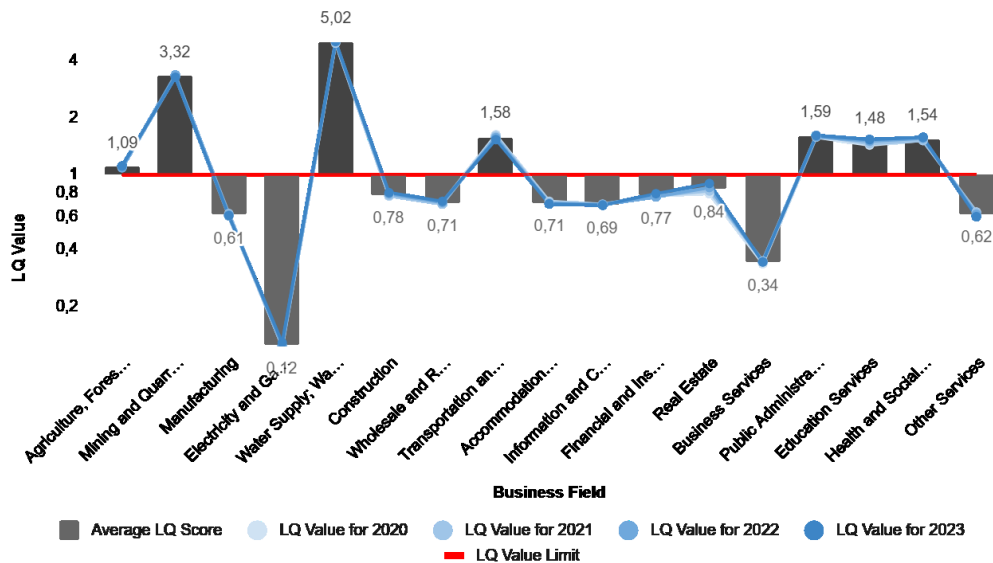
Secara konseptual, klasifikasi ini dilakukan dengan membandingkan laju pertumbuhan sektor daerah (r_i) dengan laju pertumbuhan wilayah referensi (r) serta kontribusi sektor daerah (y_i) dengan kontribusi sektor wilayah referensi (y). Kombinasi ketiga teknik analisis tersebut membentuk kerangka analisis ekonomi wilayah yang saling melengkapi. Analisis LQ digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif saat ini, DLQ digunakan untuk melihat dinamika perubahan daya saing sektoral dalam periode waktu tertentu, sementara Tipologi Klassen memberikan gambaran posisi struktural sektor berdasarkan kontribusi dan pertumbuhan ekonomi. Integrasi ketiga pendekatan ini memungkinkan identifikasi sektor unggulan, sektor potensial, serta sektor yang relatif tertinggal secara lebih komprehensif, sehingga dapat menjadi dasar analitis bagi perumusan strategi reorientasi pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan menuju struktur ekonomi yang lebih terdiversifikasi dan tidak bergantung secara berlebihan pada sektor ekstraktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Sektor-Sektor Basis di Kalimantan Selatan

Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun terakhir masih menunjukkan karakteristik ekonomi berbasis sumber daya alam. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha, sektor pertambangan dan penggalian secara konsisten menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB daerah, dengan kontribusi yang jauh melampaui sektor-sektor lainnya seperti industri pengolahan, perdagangan, maupun pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh aktivitas ekstraksi sumber daya alam primer. Meskipun nilai PDRB Kalimantan Selatan menunjukkan tren pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, struktur pertumbuhan tersebut masih sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor komoditas, khususnya batubara. Ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas primer menyebabkan dinamika ekonomi daerah sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global, sehingga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah menjadi relatif rentan terhadap guncangan eksternal.

Berdasarkan grafik *Location Quotient* yang ditampilkan pada **Gambar 1**, terlihat bahwa struktur sektoral Kalimantan Selatan memperlihatkan ketimpangan spesialisasi ekonomi yang cukup jelas. Hanya beberapa sektor yang secara konsisten memiliki nilai LQ di atas satu, sementara sebagian besar sektor lainnya masih berada di bawah nilai ambang tersebut. Nilai LQ di atas satu menunjukkan bahwa suatu sektor memiliki tingkat spesialisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah acuan, sehingga dapat dikategorikan sebagai sektor basis yang berpotensi menjadi penggerak utama perekonomian daerah.



Gambar 1. Nilai LQ Kalimantan Selatan dalam Kaitannya dengan Indonesia

Sumber: Hasil Analisis

Sektor pertambangan dan penggalian tampak sebagai sektor dengan nilai LQ paling dominan dan relatif stabil tinggi, bahkan mencapai nilai di atas tiga pada beberapa periode pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kalimantan Selatan masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif sebagai tulang punggung utama aktivitas ekonomi daerah. Tingginya nilai LQ pada sektor ini mengindikasikan bahwa produksi sektor pertambangan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga berorientasi pada pasar eksternal. Meskipun sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap PDRB daerah, dominasi yang terlalu kuat dapat menimbulkan ketidakseimbangan

struktural karena sektor ekstraktif umumnya memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan yang relatif terbatas dibandingkan sektor manufaktur atau jasa modern.

Tabel 1. Nilai LQ Kalimantan Selatan dalam Kaitannya dengan Indonesia

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	LQ
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,089	1,084	1,107	1,09
Pertambangan dan Penggalian	3,319	3,364	3,275	3,32
Industri Pengolahan	0,621	0,613	0,605	0,61
Pengadaan Listrik dan Gas	0,123	0,124	0,128	0,12
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,981	5,069	5,069	5,02
Konstruksi	0,772	0,789	0,801	0,78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,698	0,710	0,720	0,71
Transportasi dan Pergudangan	1,601	1,568	1,530	1,58
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,715	0,702	0,698	0,71
Informasi dan Komunikasi	0,697	0,693	0,688	0,69
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,772	0,762	0,791	0,77
Real Estat	0,818	0,853	0,895	0,84
Jasa Perusahaan	0,348	0,345	0,343	0,34
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,611	1,582	1,608	1,59
Jasa Pendidikan	1,454	1,500	1,529	1,48
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,513	1,553	1,572	1,54
Jasa Lainnya	0,631	0,617	0,598	0,62

Sumber: Hasil Analisis

Selain sektor pertambangan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang juga menunjukkan nilai LQ yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pelayanan dasar tertentu memiliki tingkat spesialisasi yang cukup kuat dalam struktur ekonomi wilayah. Kondisi ini dapat berkaitan dengan kebutuhan pelayanan infrastruktur dasar yang meningkat seiring dengan perkembangan kawasan perkotaan dan pertumbuhan aktivitas ekonomi di wilayah Kalimantan Selatan.

Beberapa sektor jasa seperti transportasi dan pergudangan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga menunjukkan nilai LQ di atas satu meskipun tidak setinggi sektor pertambangan. Keberadaan sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa perekonomian daerah tidak sepenuhnya bergantung pada sektor ekstraksi, tetapi mulai berkembang ke arah sektor jasa yang berfungsi sebagai penopang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Sektor-sektor ini umumnya memiliki karakteristik pertumbuhan yang lebih stabil dan memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi daerah.

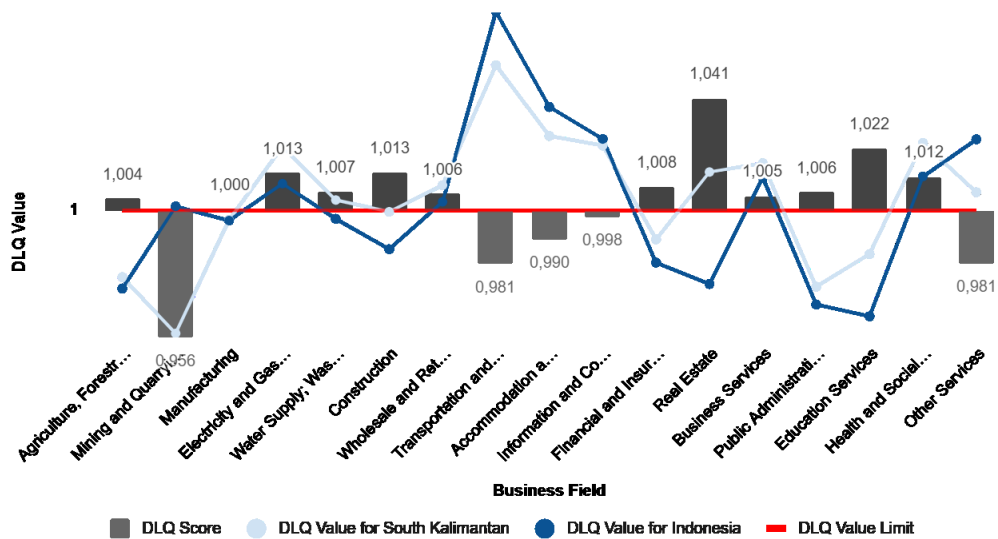
Di sisi lain, sebagian besar sektor ekonomi lainnya seperti industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, serta jasa perusahaan masih menunjukkan nilai LQ di bawah satu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut belum berkembang sebagai sektor basis dalam perekonomian daerah. Secara khusus, rendahnya nilai LQ pada sektor industri pengolahan menunjukkan bahwa proses hilirisasi sumber daya alam di Kalimantan Selatan masih relatif terbatas. Padahal, sektor industri pengolahan memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi serta memperkuat keterkaitan antar sektor dalam perekonomian regional.

Rendahnya perkembangan sektor industri pengolahan di Kalimantan Selatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural. Salah satunya adalah kuatnya orientasi ekonomi daerah terhadap eksploitasi komoditas primer yang selama ini menjadi sumber utama penerimaan daerah. Ketergantungan fiskal dan ekonomi terhadap sektor pertambangan sering kali membuat investasi dan kebijakan pembangunan lebih terfokus pada sektor ekstraktif dibandingkan pengembangan sektor industri berbasis pengolahan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur industri, rendahnya diversifikasi basis produksi, serta belum optimalnya pengembangan rantai nilai industri juga menjadi hambatan dalam mendorong pertumbuhan sektor manufaktur di tingkat regional.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kalimantan Selatan masih berada pada tahap awal transformasi struktural, di mana sektor primer masih mendominasi sementara sektor industri dan jasa modern belum berkembang secara optimal sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya reorientasi strategi pembangunan ekonomi daerah yang tidak hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga mendorong pengembangan sektor-sektor non-ekstraktif yang memiliki potensi nilai tambah lebih tinggi. Diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor industri pengolahan, perdagangan, serta jasa modern menjadi langkah strategis untuk menciptakan struktur ekonomi daerah yang lebih seimbang, resilien, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Identifikasi Sektor-Sektor Prospektif di Kalimantan Selatan

Berbeda dengan analisis *Location Quotient* (LQ) yang menggambarkan posisi sektoral secara statis, analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) memberikan gambaran mengenai dinamika pertumbuhan sektoral Kalimantan Selatan dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat nasional, dapat dilihat pada **Gambar 2**. Dengan demikian, DLQ tidak hanya menunjukkan apakah suatu sektor merupakan sektor basis, tetapi juga mengindikasikan apakah sektor tersebut tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan wilayah acuan. Garis batas DLQ = 1 pada grafik menjadi indikator penting dalam membaca dinamika tersebut. Nilai DLQ di atas satu menunjukkan bahwa sektor tersebut mengalami pertumbuhan relatif lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional, sedangkan nilai di bawah satu menunjukkan pertumbuhan yang relatif lebih lambat.



Gambar 2. Nilai DLQ Kalimantan Selatan dalam Kaitannya dengan Indonesia

Sumber: Hasil Analisis

Secara umum, nilai DLQ sektor-sektor ekonomi di Kalimantan Selatan tampak berfluktuasi di sekitar angka satu, yang menandakan bahwa laju pertumbuhan sebagian besar sektor relatif sejalan dengan tren nasional. Namun demikian, beberapa sektor menunjukkan nilai DLQ yang secara konsisten berada di atas satu. Sektor pengadaan listrik dan gas, pengelolaan air dan limbah, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial merupakan sektor-sektor yang memperlihatkan keunggulan pertumbuhan relatif dibandingkan dengan tingkat nasional. Pertumbuhan sektor-sektor pelayanan dasar ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi meningkatnya kebutuhan pelayanan publik seiring dengan perkembangan wilayah dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Selain itu,

ekspansi sektor-sektor tersebut juga mencerminkan peran pemerintah daerah dalam memperluas layanan dasar bagi masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah.

Tabel 2. Nilai DLQ Kalimantan Selatan dalam Kaitannya dengan Indonesia

Lapangan Usaha	Kalimantan Selatan	Indonesia	DLQ
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,977	0,973	1,004
Pertambangan dan Penggalian	0,957	1,001	0,956
Industri Pengolahan	0,997	0,996	1,000
Pengadaan Listrik dan Gas	1,023	1,010	1,013
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,004	0,997	1,007
Konstruksi	1,000	0,986	1,013
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,009	1,003	1,006
Transportasi dan Pergudangan	1,053	1,073	0,981
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,027	1,037	0,990
Informasi dan Komunikasi	1,023	1,026	0,998
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,990	0,982	1,008
Real Estat	1,014	0,974	1,041
Jasa Perusahaan	1,017	1,012	1,005
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,973	0,967	1,006
Jasa Pendidikan	0,985	0,963	1,022
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,024	1,012	1,012
Jasa Lainnya	1,006	1,026	0,981

Sumber: Hasil Analisis

Sebaliknya, beberapa sektor memperlihatkan nilai DLQ yang cenderung berada di bawah satu, yang menunjukkan bahwa pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan dengan rata-rata nasional. Sektor pertambangan dan penggalian menjadi contoh yang paling menonjol dalam pola ini. Meskipun sektor ini memiliki nilai LQ yang sangat tinggi dan masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, nilai DLQ yang relatif rendah menunjukkan adanya indikasi perlambatan pertumbuhan relatif. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan karakteristik sektor ekstraktif yang sangat dipengaruhi oleh siklus harga komoditas global serta keterbatasan sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan. Dalam perspektif pembangunan wilayah, fenomena ini sering dipandang sebagai sinyal awal perlunya diversifikasi ekonomi agar ketergantungan terhadap satu sektor utama tidak menimbulkan kerentanan struktural dalam jangka panjang.

Sektor-sektor lain seperti transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makan minum, serta berbagai sektor jasa lainnya juga menunjukkan nilai DLQ yang relatif rendah dan cenderung fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor-sektor tersebut belum sepenuhnya stabil dan masih sangat dipengaruhi oleh dinamika permintaan regional maupun nasional. Dalam konteks Kalimantan Selatan, kondisi ini dapat berkaitan dengan skala pasar lokal yang relatif terbatas serta keterkaitan ekonomi yang masih sangat bergantung pada aktivitas sektor basis, terutama pertambangan. Ketika sektor utama mengalami perlambatan, sektor-sektor pendukung tersebut juga cenderung mengalami dampak tidak langsung terhadap kinerjanya.

Menariknya, terdapat beberapa sektor yang menunjukkan nilai DLQ mendekati atau sedikit di atas satu meskipun nilai LQ-nya masih berada di bawah satu. Sektor industri pengolahan dan perdagangan besar serta eceran merupakan contoh penting dari pola tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedua sektor tersebut belum menjadi sektor basis dalam struktur ekonomi daerah, laju pertumbuhannya mulai menunjukkan akselerasi relatif dibandingkan dengan tingkat nasional. Fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya potensi pertumbuhan laten pada sektor-sektor tersebut. Dalam kerangka perencanaan pembangunan wilayah, sektor dengan karakteristik seperti ini sering dipandang sebagai sektor potensial yang dapat didorong melalui kebijakan penguatan

investasi, peningkatan konektivitas infrastruktur, serta pengembangan rantai nilai ekonomi daerah.

Rendahnya peran sektor industri pengolahan dalam struktur ekonomi Kalimantan Selatan juga dapat dijelaskan oleh beberapa faktor struktural. Salah satunya adalah orientasi pembangunan ekonomi daerah yang selama ini lebih banyak bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam primer, sehingga proses hilirisasi industri belum berkembang secara optimal. Ketergantungan fiskal terhadap sektor pertambangan juga berpotensi memengaruhi arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah, di mana investasi dan perhatian pembangunan cenderung lebih terfokus pada sektor ekstraktif dibandingkan pengembangan sektor manufaktur. Selain itu, keterbatasan infrastruktur industri, skala pasar regional yang relatif terbatas, serta belum berkembangnya ekosistem industri berbasis rantai nilai juga menjadi hambatan dalam mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan di tingkat regional.

Secara keseluruhan, hasil analisis DLQ menunjukkan bahwa dinamika perekonomian Kalimantan Selatan berada pada fase transisi. Sektor-sektor pelayanan dasar dan sosial menunjukkan pertumbuhan yang relatif lebih cepat, sementara sektor ekstraktif yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi mulai memperlihatkan tanda-tanda perlambatan relatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi daerah secara perlahan mulai mengalami pergeseran menuju komposisi yang lebih beragam, meskipun proses transformasi tersebut masih berlangsung secara terbatas. Oleh karena itu, strategi pembangunan ekonomi daerah ke depan perlu diarahkan pada penguatan sektor-sektor non-ekstraktif yang memiliki potensi nilai tambah lebih tinggi, khususnya sektor industri pengolahan dan sektor jasa produktif, sehingga struktur ekonomi Kalimantan Selatan dapat berkembang menjadi lebih seimbang, resilien, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Klasifikasi Sektor dan Perencanaan Perekonomian di Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen yang merupakan kombinasi hasil dari *Location Quotient* (LQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ), struktur perekonomian Kalimantan Selatan dapat diklasifikasikan ke dalam empat kuadran yang merefleksikan posisi keunggulan komparatif sekaligus dinamika pertumbuhan sektoral. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih komprehensif, tidak hanya mengenai sektor mana yang unggul, tetapi juga bagaimana arah pergeseran struktur ekonomi daerah dalam jangka waktu tertentu.

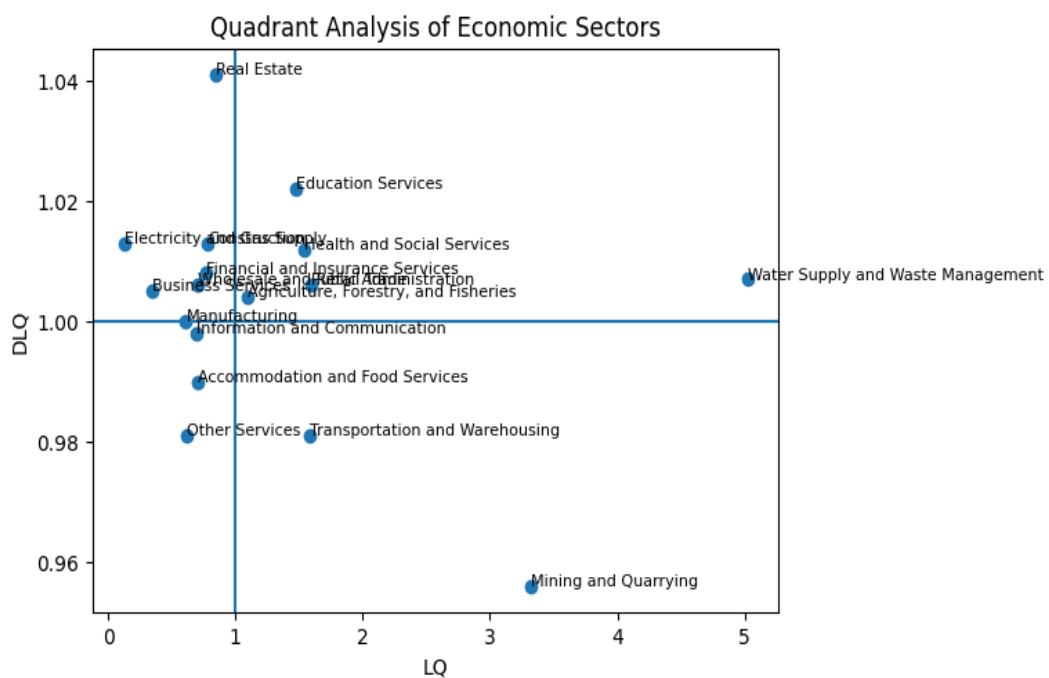
Kuadran I ($LQ > 1$ dan $DLQ > 1$) merepresentasikan sektor unggulan yang bersifat prospektif, yakni sektor-sektor yang telah memiliki basis ekonomi yang kuat dan secara simultan menunjukkan kinerja pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan wilayah acuan. Di Kalimantan Selatan, sektor yang termasuk dalam kuadran ini meliputi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Keberadaan sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa perekonomian daerah tidak semata bergantung pada sektor ekstraktif, tetapi juga ditopang oleh sektor-sektor pelayanan dasar dan sosial yang relatif stabil. Dalam perspektif ekonomi regional, sektor-sektor pada kuadran ini umumnya dipandang sebagai motor utama pertumbuhan daerah karena memiliki keterkaitan antar sektor yang kuat serta mampu menghasilkan efek pengganda yang signifikan terhadap perekonomian lokal (Miller & Blair, 2009; Rodríguez-Pose, 2013). Oleh karena itu, strategi kebijakan pada sektor ini lebih diarahkan pada penguatan produktivitas, peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan nilai tambah.

Kuadran II ($LQ < 1$ dan $DLQ > 1$) menggambarkan sektor non-basis yang sedang mengalami pertumbuhan relatif lebih cepat. Artinya, meskipun kontribusi sektor-sektor ini terhadap perekonomian daerah belum dominan, kinerjanya menunjukkan potensi yang cukup kuat untuk berkembang di masa mendatang. Sektor-sektor yang termasuk dalam

kategori ini antara lain Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, serta Jasa Perusahaan. Dalam konteks perencanaan wilayah, sektor-sektor Kuadran II memiliki peran strategis sebagai pendorong transformasi struktur ekonomi menuju arah yang lebih terdiversifikasi dan bernilai tambah. Dukungan kebijakan yang tepat, seperti peningkatan investasi, penguatan infrastruktur, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia, berpotensi mendorong sektor-sektor ini untuk bertransisi menjadi sektor basis di masa depan (Sjafrizal, 2014).

Kuadran III ($LQ < 1$ dan $DLQ < 1$) mencerminkan sektor-sektor yang relatif tertinggal, baik dari sisi kontribusi maupun laju pertumbuhan. Berdasarkan hasil pemetaan, sektor yang berada dalam kuadran ini meliputi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Lainnya. Posisi ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut belum memainkan peran signifikan dalam struktur perekonomian daerah dan sekaligus menghadapi keterbatasan dalam dinamika pertumbuhannya. Dalam banyak kajian ekonomi regional, sektor Kuadran III umumnya tidak langsung diprioritaskan sebagai penggerak utama pertumbuhan, melainkan diposisikan sebagai sektor pendukung yang pengembangannya sangat bergantung pada karakteristik wilayah, permintaan lokal, serta keterkaitannya dengan sektor unggulan lainnya (Tarigan, 2024).

Sementara itu, Kuadran IV ($LQ > 1$ dan $DLQ < 1$) merepresentasikan sektor basis yang cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan. Di Kalimantan Selatan, sektor yang termasuk dalam kategori ini adalah Pertambangan dan Penggalian serta Transportasi dan Pergudangan. Meskipun sektor-sektor ini masih memiliki keunggulan komparatif dan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, tren pertumbuhan yang melambat mengindikasikan adanya keterbatasan keberlanjutan jika tetap dikembangkan dengan pola yang sama. Sektor-sektor pada kuadran ini memerlukan strategi transformasi struktural, seperti peningkatan nilai tambah, diversifikasi aktivitas ekonomi, atau integrasi dengan sektor lain, agar tidak menjadi faktor penghambat pembangunan ekonomi jangka panjang (Rodríguez-Pose, 2013).



Gambar 3. Pengklasifikasian Sektor dan Perencanaan Perekonomian di Kalimantan Selatan
 Sumber: Hasil Analisis

Klasifikasi sektor tersebut dapat memberikan landasan analitis yang kuat bagi perumusan arah perencanaan perekonomian Kalimantan Selatan baik secara jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Pada jangka pendek (1–5 tahun), fokus utama idealnya diarahkan pada sektor prima, yaitu sektor yang sudah berada di Kuadran I ($LQ > 1$ dan $DLQ > 1$). Dalam konteks data kamu, sektor seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pengelolaan Air dan Limbah, Administrasi Pemerintahan, Pendidikan, serta Kesehatan dan Kegiatan Sosial layak dijadikan jangkar pembangunan awal. Secara realistis, sektor-sektor ini relatif siap secara struktur, punya basis tenaga kerja, dan kontribusinya sudah nyata terhadap perekonomian daerah. Strategi kebijakan pada fase ini bukan lagi “menumbuhkan dari nol”, tetapi lebih ke penguatan kualitas, misalnya peningkatan produktivitas, efisiensi layanan, serta keterkaitan antar sektor (*forward and backward linkages*). Literatur menyebut fase ini sebagai *consolidation phase*, dimana pemerintah daerah seharusnya memaksimalkan *multiplier effect* dari sektor unggulan yang ada (Miller & Blair, 2009).

Masuk ke jangka menengah (5–10 tahun), orientasi perencanaan mulai bergeser ke sektor yang berpotensi berkembang menjadi sektor prima, terutama sektor-sektor di Kuadran II ($LQ < 1$ dan $DLQ > 1$). Sektor seperti Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan, Jasa Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan menjadi kandidat kuat untuk didorong naik kelas. Pada tahap ini, intervensi kebijakan perlu lebih struktural, misalnya penyediaan infrastruktur pendukung, kemudahan investasi, penguatan UMKM, dan peningkatan kualitas SDM. Dalam banyak studi ekonomi regional, sektor Kuadran II dianggap krusial karena menjadi jembatan transformasi dari ekonomi berbasis sektor tradisional menuju ekonomi yang lebih terdiversifikasi dan bernilai tambah (Rodríguez-Pose, 2013). Apabila dalam fase ini gagal, daerah cenderung terjebak pada ketergantungan sektor lama.

Selanjutnya, jangka menengah lanjutan (10–25 tahun) menjadi fase transisi yang lebih kompleks. Di tahap ini, ada dua agenda besar yang berjalan bersamaan. Pertama, sektor berkembang diarahkan benar-benar menjadi sektor prima, artinya sektor Kuadran II yang berhasil tumbuh akan berpindah ke Kuadran I secara struktural. Kedua, sektor tertinggal (Kuadran III) seperti Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Lainnya mulai diarahkan agar minimal naik menjadi sektor berkembang. Pendekatannya tidak bisa disamaratakan; beberapa sektor mungkin cukup dengan stimulus permintaan, sementara yang lain butuh reformasi kelembagaan atau teknologi. Dalam perspektif teori pembangunan wilayah, fase ini sering disebut sebagai tahap diversifikasi ekonomi, yang menentukan daya tahan wilayah terhadap guncangan eksternal (Bendauid-Val, 1983).

Terakhir, pada jangka panjang (di atas 25 tahun), arah kebijakan seharusnya sudah lebih visioner, yaitu memastikan sektor berkembang benar-benar bertransformasi menjadi sektor prima yang berkelanjutan. Pada fase ini pula, sektor Kuadran IV seperti Pertambangan dan Penggalian serta Transportasi dan Pergudangan perlu dikelola secara hati-hati. Meski masih menjadi sektor basis, tren pertumbuhannya yang melambat menuntut strategi transformasi, misalnya melalui hilirisasi, peningkatan nilai tambah, atau integrasi dengan sektor lain. Literatur pembangunan menegaskan bahwa tanpa transformasi, sektor basis yang stagnan justru bisa menjadi penghambat pembangunan jangka panjang (Rodríguez-Pose, 2013).

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berikut disajikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang ditujukan terutama bagi pemerintah daerah sebagai langkah strategis untuk merespons dan mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, khususnya terkait arah pengembangan perekonomian daerah yang bisa lebih mengedepankan ekonomi yang berkelanjutan dan resilien.

Simpulan

Dominasi sektor ekstraktif dalam struktur perekonomian Kalimantan Selatan juga memiliki implikasi penting terhadap kerentanan lingkungan, khususnya peningkatan risiko banjir. Aktivitas pertambangan skala besar, terutama batubara, secara empiris berkorelasi dengan perubahan tutupan lahan, degradasi hutan, serta meningkatnya area lahan terbuka yang memiliki kemampuan infiltrasi rendah. Berbagai studi menunjukkan bahwa konversi hutan menjadi area pertambangan dan infrastruktur ekstraktif dapat meningkatkan limpasan permukaan (surface runoff) serta mempercepat aliran air menuju sistem sungai, yang pada akhirnya meningkatkan debit puncak dan potensi banjir di wilayah hilir. Dalam konteks Kalimantan, penelitian berbasis penginderaan jauh juga menemukan bahwa ekspansi pertambangan berkontribusi signifikan terhadap fragmentasi lanskap dan penurunan fungsi hidrologis hutan tropis. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada sektor ekstraktif tidak hanya menciptakan kerentanan ekonomi terhadap fluktuasi harga komoditas, tetapi juga meningkatkan kerentanan ekologis wilayah melalui degradasi jasa ekosistem, khususnya fungsi regulasi air. Oleh karena itu, temuan analisis sektoral dalam penelitian ini memperkuat argumen bahwa reorientasi pembangunan ekonomi menuju sektor non-ekstraktif yang lebih berkelanjutan tidak hanya penting untuk diversifikasi ekonomi, tetapi juga untuk mengurangi tekanan terhadap sistem ekologis dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologis.

Rekomendasi

Berangkat dari temuan tersebut, pemerintah daerah perlu mengambil langkah kebijakan yang lebih strategis dan terarah untuk mendorong transformasi struktural perekonomian Kalimantan Selatan. Pertama, pemerintah perlu secara bertahap mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif dengan memperketat pengendalian lingkungan, memperkuat penegakan tata ruang, serta memastikan internalisasi biaya eksternal melalui instrumen fiskal dan regulasi yang tepat. Pendekatan ini penting agar manfaat ekonomi sektor ekstraktif tidak dibayar mahal dengan kerusakan lingkungan dan meningkatnya risiko bencana di masa depan (Barbier 2019; Rockström *et al.* 2009). Kedua, sektor-sektor unggulan yang relatif stabil dan prospektif, khususnya pertanian, pengelolaan air dan limbah, pendidikan, serta kesehatan, perlu dijadikan jangkar pembangunan jangka pendek melalui peningkatan produktivitas, kualitas layanan, dan penguatan keterkaitan antar sektor sehingga efek penggandanya terhadap perekonomian lokal bisa dimaksimalkan (Miller and Blair 2009).

Ketiga, pemerintah daerah perlu secara aktif mendorong sektor-sektor non-basis yang sedang tumbuh, seperti industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan, dan real estat, sebagai motor diversifikasi ekonomi jangka menengah. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyediaan infrastruktur pendukung, kemudahan investasi, penguatan UMKM lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor tersebut. Keberhasilan mendorong sektor-sektor potensial ini sangat menentukan kemampuan daerah keluar dari jebakan ketergantungan sumber daya alam (Auty 2007; Rodríguez-Pose and Wilkie 2017). Keempat, dalam jangka panjang, sektor ekstraktif yang masih menjadi basis ekonomi perlu diarahkan pada strategi transformasi, seperti hilirisasi, peningkatan nilai tambah, dan integrasi dengan sektor lain, agar tidak menjadi penghambat pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan ini menuntut peran pemerintah daerah yang lebih proaktif, adaptif, dan berbasis bukti, dengan mengedepankan pendekatan *place-based development* agar arah pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan benar-benar selaras dengan karakteristik wilayah dan daya dukung lingkungannya (Pike, Rodríguez-Pose, and Tomaney 2017; Barca, McCann, and Rodríguez-Pose 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Ike Sari, Kamalakanta Sahoo, Adam Milewski, and Deepak R Mishra. 2019. "Impact of Land Use Land Cover (LULC) Change on Surface Runoff in an Increasingly Urbanized Tropical Watershed." *Water Resources Management* 33 (12): 4087–4103. <https://doi.org/10.1007/s11269-019-02320-w>.
- Austin, Kemen G, Amanda Schwantes, Yaofeng Gu, and Prasad S Kasibhatla. 2019. "What Causes Deforestation in Indonesia?" *Environmental Research Letters* 14 (2): 24007. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaf6db>.
- Auty, Richard M. 2007. "Natural Resources, Capital Accumulation and the Resource Curse." *Ecological Economics* 61 (4): 627–34. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.09.006>.
- Bangalore, Mook, Stephane Hallegatte, Adrien Vogt-Schilb, and Julie Rozenberg. 2017. *Unbreakable: Building the Resilience of the Poor in the Face of Natural Disasters*. Washington, DC: World Bank. <https://hdl.handle.net/10986/25335>.
- Banjara, Mandip, Amrit Bhusal, Amrit Babu Ghimire, and Ajay Kalra. 2024. "Impact of Land Use and Land Cover Change on Hydrological Processes in Urban Watersheds: Analysis and Forecasting for Flood Risk Management." *Geosciences* 14 (2): 40. <https://doi.org/10.3390/geosciences14020040>.
- Barbier, Edward B. 2019. "The Concept of Natural Capital." *Oxford Review of Economic Policy* 35 (1): 14–36. <https://doi.org/10.1093/oxrep/gry028>.
- Barca, Fabrizio, Philip McCann, and Andrés Rodríguez-Pose. 2012. "The Case For Regional Development Intervention: Place-Based Versus Place-Neutral Approaches." *Journal of Regional Science* 52 (1): 134–52. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.2011.00756.x>.
- Barro, Robert J, and Xavier I Sala-i-Martin. 2003. *Economic Growth, Second Edition*. S.I.: The MIT Press.
- Bendavid-Val, Avrom C N - HT391 .B38 1983. 1983. *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*. New and ex. New York, NY: Praeger.
- Boschma, Ron. 2015. "Towards an Evolutionary Perspective on Regional Resilience." *Regional Studies* 49 (5): 733–51. <https://doi.org/10.1080/00343404.2014.959481>.
- Capello, Roberta. 2016. *Regional Economics. Routledge Advanced Texts in Economics and Finance CN - HT388 .C35 2016*. Second Edi. Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Capello, Roberta, and Peter Nijkamp. 2019. *Handbook of Regional Growth and Development Theories. Elgaronline*. Revised an. Cheltenham, UK Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
- Carter, Michael R, Peter D Little, Tewodaj Mogues, and Workneh Negatu. 2007. "Poverty Traps and Natural Disasters in Ethiopia and Honduras." *World Development* 35 (5): 835–56. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2006.09.010>.
- Costanza, Robert, Rudolf De Groot, Paul Sutton, Sander Van Der Ploeg, Sharolyn J Anderson, Ida Kubiszewski, Stephen Farber, and R Kerry Turner. 2014. "Changes in the Global Value of Ecosystem Services." *Global Environmental Change* 26 (December):152–58. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002>.
- Frankel, Jeffrey. 2010. "The Natural Resource Curse: A Survey." Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. <http://www.nber.org/papers/w15836.pdf>.
- Gaveau, David L A, Sean Sloan, Elis Molidena, Husna Yaen, Doug Sheil, Nicola K Abram, and Marc Ancrenaz. 2014. "Four Decades of Forest Persistence, Clearance and Logging on Borneo." Edited by Kamal Bawa. *PLoS ONE* 9 (7): e101654. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0101654>.

- Indonesia, C N N. 2025. "Banjir Bandang Hantam Balangan Kalsel, Ketinggian Air hingga 2 Meter." *cnnindonesia.com*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251227145406-20-1311098/banjir-bandang-hantam-balangan-kalsel-ketinggian-air-hingga-2-meter>.
- Indonesia, CNBC. 2025. "Banjir Terjang Kalimantan Selatan, Air Sudah Setinggi Atap Rumah." *cnbcindonesia.com*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20251227200746-4-697616/banjir-terjang-kalimantan-selatan-air-sudah-setinggi-atap-rumah>.
- Iqbal, Zafar, Zeeshan Tahir Virk, Mohammed Magdy Hamed, Ali Torabi Haghghi, Shamsuddin Shahid, and Zaher Mundher Yaseen. 2025. "Mapping Water Dynamics in Borneo's Biodiversity Hotspot: A Satellite-Based Analysis." *Theoretical and Applied Climatology* 156 (7): 413. <https://doi.org/10.1007/s00704-025-05631-8>.
- Irianto, Andis Destrian. 2025. "Analisis Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Serta Kontribusi Per Lapangan Usaha Kota Cirebon Tahun 2024 - 2045." *Jurnal Inovasi Ekonomi Kreatif*.
- Isard, Walter, Iwan J Azis, Matthew P Drennan, Ronald E Miller, Sidney Saltzman, and Erik Thorbecke. 2017. *Methods of Interregional and Regional Analysis*. 1st ed. Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/9781351917902>.
- Kumagai, T, H Kanamori, and N A Chappell. 2025. "Tropical Forest Hydrology." In *Forest Hydrology*, edited by Leon Bren, Devendra Amatya, Thomas Williams, Carmen De Jong, and Ge Sun, 2nd ed., 143–59. GB: CABI. <http://www.cabidigitallibrary.org/doi/10.1079/9781800625310.0009>.
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan daerah: bagaimana membangun ekonomi lokal, kota, dan kawasan?* Jagakarsa, Jakarta: Salemba Empat.
- Labrière, Nicolas, Bruno Locatelli, Ghislain Vieilledent, Selly Kharisma, Imam Basuki, Valéry Gond, and Yves Laumonier. 2016. "Spatial Congruence between Carbon and Biodiversity across Forest Landscapes of Northern Borneo." *Global Ecology and Conservation* 6 (December):105–20. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2016.01.005>.
- Martin, Ron, and Peter Sunley. 2015. "On the Notion of Regional Economic Resilience: Conceptualization and Explanation." *Journal of Economic Geography* 15 (1): 1–42. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbu015>.
- McCann, Philip. 2013. *Modern Urban and Regional Economics*. Second edi. Oxford: Oxford University Press.
- McCann, Philip, and Raquel Ortega-Argilés. 2011. "Smart Specialisation, Regional Growth and Applications to EU Cohesion Policy." In . <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:73615890>.
- McCarthy, John F., and Kathryn Robinson. 2016. *Land and Development in Indonesia: Searching for the People's Sovereignty. Indonesia Update Series*. S.I.: ISEAS Publishing.
- Miller, Ronald E, and Peter D Blair. 2009. *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions*. 2nd ed. Cambridge New York: Cambridge University Press.
- Muzdalifah, Muzdalifah, Syahrithuah Siregar, Ayu Fitriani, and Norlatifah Norlatifah. 2025. "Sektor Potensial Sebagai Backbone Pada Kabupaten Berbasis Sektor Pertambangan Di Kalimantan Selatan." *Diponegoro Journal of Economics* 14 (1): 41–52. <https://doi.org/10.14710/djoe.50670>.
- Nainar, A, N Tanaka, K Bidin, K V Annammala, R M Ewers, G Reynolds, and R P D Walsh. 2018. "Hydrological Dynamics of Tropical Streams on a Gradient of Land-Use Disturbance and Recovery: A Multi-Catchment Experiment." *Journal of Hydrology* 566 (December):581–94. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.09.022>.
- Nazara, Suahasil. 1997. *Analisis input-output*. Jakarta: Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

- Oo, Tin Zar, and Usa Wannasingha Humphries. 2025. "Hydrological Modeling of Flood Impacts under Land Use and Land Cover Change: A Systematic Review of Tools, Trends, and Challenges." *MethodsX*, December, 103724. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2025.103724>.
- Pike, Andy, Andrés Rodríguez-Pose, and John Tomaney. 2017. "Shifting Horizons in Local and Regional Development." *Regional Studies* 51 (1): 46–57. <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1158802>.
- Qie, Lan, Simon L Lewis, Martin J P Sullivan, Gabriela Lopez-Gonzalez, Georgia C Pickavance, Terry Sunderland, and Peter Ashton. 2017. "Long-Term Carbon Sink in Borneo's Forests Halted by Drought and Vulnerable to Edge Effects." *Nature Communications* 8 (1): 1966. <https://doi.org/10.1038/s41467-017-01997-0>.
- Richardson, Harry W. 1976. *Regional Economics: Location Theory, Urban Structure and Regional Change*. Repr. London: Weidenfeld and Nicolson.
- Ridwan, Muhammad, and Joko Sarjito. 2024. "Studi Kajian Dampak Perubahan Tutupan Lahan Terhadap Kejadian Banjir Di Daerah Aliran Sungai." *ENVIRO: Journal of Tropical Environmental Research* 26 (1): 38. <https://doi.org/10.20961/enviro.v26i1.93145>.
- Rockström, Johan, Will Steffen, Kevin Noone, Åsa Persson, F Stuart Chapin, Eric F Lambin, and Timothy M Lenton. 2009. "A Safe Operating Space for Humanity." *Nature* 461 (7263): 472–75. <https://doi.org/10.1038/461472a>.
- Rodríguez-Pose, Andrés. 2013. "Do Institutions Matter for Regional Development?" *Regional Studies* 47 (7): 1034–47. <https://doi.org/10.1080/00343404.2012.748978>.
- Rodríguez-Pose, Andrés, and Callum Wilkie. 2017. "Revamping Local and Regional Development Through Place-Based Strategies." *Cityscape* 19 (1): 151–70. <http://www.jstor.org/stable/26328304>.
- Sachs, Jeffrey D, and Andrew M Warner. 2001. "The Curse of Natural Resources." *European Economic Review* 45 (4–6): 827–38. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(01\)00125-8](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00125-8).
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi*. Cetakan ke. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Smith, C, J C A Baker, and D V Spracklen. 2023. "Tropical Deforestation Causes Large Reductions in Observed Precipitation." *Nature* 615 (7951): 270–75. <https://doi.org/10.1038/s41586-022-05690-1>.
- Sullivan, Martin J P, Joey Talbot, Simon L Lewis, Oliver L Phillips, Lan Qie, Serge K Begne, and Jérôme Chave. 2017. "Diversity and Carbon Storage across the Tropical Forest Biome." *Scientific Reports* 7 (1): 39102. <https://doi.org/10.1038/srep39102>.
- Tarigan, Robinson. 2024. *Ekonomi Regional: Teori Dan Aplikasi*. Bumi Aksara.
- Tellman, B, J A Sullivan, C Kuhn, A J Kettner, C S Doyle, G R Brakenridge, T A Erickson, and D A Slayback. 2021. "Satellite Imaging Reveals Increased Proportion of Population Exposed to Floods." *Nature* 596 (7870): 80–86. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03695-w>.
- Ward, Philip J, Brenden Jongman, Frederiek Sperna Weiland, Arno Bouwman, Rens Van Beek, Marc F P Bierkens, Willem Ligtoet, and Hessel C Winsemius. 2013. "Assessing Flood Risk at the Global Scale: Model Setup, Results, and Sensitivity." *Environmental Research Letters* 8 (4): 44019. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/8/4/044019>.
- Winsemius, Hessel C, Brenden Jongman, Ted I E Veldkamp, Stephane Hallegatte, Mook Bangalore, and Philip J Ward. 2018. "Disaster Risk, Climate Change, and Poverty: Assessing the Global Exposure of Poor People to Floods and Droughts." *Environment and Development Economics* 23 (3): 328–48. <https://doi.org/10.1017/S1355770X17000444>.